

Research Article

Factors Hindering the Implementation of Srikandi in Regional Government (Case Study at Bappeda-Litbang of Indramayu Regency)

Syahwelly Arisko

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: shahwellyarisko@gmail.com

Luthfi Faisal Natsir

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: luthfinatsir.lfn@gmail.com

Ilham Setiawan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: setiawanilham294@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by Diplomasi: Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat. This is an open access article under the CC BY License: (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : May 21, 2026

Revised : June 23, 2026

Accepted : July 14, 2026

Available online : July 26, 2026

How to Cite: Syahwelly Arisko, Luthfi Faisal Natsir, & Ilham Setiawan. (2026). Factors Hindering the Implementation of Srikandi in Regional Government (Case Study at Bappeda-Litbang of Indramayu Regency). *Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(3), 208–212. <https://doi.org/10.58355/dpl.v4i3.98>

Abstract

This research employs a case study at the Regional Development Planning, Research and Development Agency (Bappeda Litbang) of Indramayu Regency to investigate the challenges associated with the implementation of the Integrated Dynamic Archival Information System (Srikandi) in local government. Srikandi is an element of the Electronic-Based Government System's (SPBE) digital transformation, expected to improve archive management efficiency and foster transparent and accountable governance. Nonetheless, certain challenges persist regarding its practical execution. This research employs a case study technique and a qualitative approach. George C. Edward III's policy implementation theory, highlighting four dimensions communication, resources, disposition, and bureaucratic structure was employed to examine data collected through in-depth interviews, observations, and document analysis. This study concludes that enhanced communication, growth of human resource capacity, improvement of technological infrastructure, and the optimization of bureaucratic procedures are essential for the successful implementation of Srikandi. These results are expected to assist local governments in enhancing their strategies for

Factors Hindering the Implementation of Srikandi in Regional Government (Case Study at Bappeda-Litbang of Indramayu Regency)

Syahrully Arisko, Luthfi Faisal Natsir, Ilham Setiawan

future implementation of digital archive regulations.

Kata Kunci: Policy Implementation, Srikandi, Bappeda Litbang.

Faktor-Faktor Kendala Implementasi Srikandi di Pemerintahan Daerah (Studi Kasus di Bappeda-Litbang Kabupaten Indramayu)

Abstrak

Penelitian ini menggunakan studi kasus di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah (Bappeda Litbang) Kabupaten Indramayu untuk menyelidiki tantangan yang terkait dengan implementasi Sistem Informasi Arsip Dinamis Terpadu (Srikandi) di pemerintahan daerah. Srikandi merupakan elemen transformasi digital Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip dan mendorong tata kelola yang transparan dan akuntabel. Meskipun demikian, beberapa tantangan masih tetap ada terkait dengan pelaksanaannya secara praktis. Penelitian ini menggunakan teknik studi kasus dan pendekatan kualitatif. Teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang menyoroti empat dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi digunakan untuk meneliti data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Studi ini menyimpulkan bahwa peningkatan komunikasi, pertumbuhan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur teknologi, dan optimalisasi prosedur birokrasi sangat penting untuk keberhasilan implementasi Srikandi. Hasil ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan strategi mereka untuk implementasi peraturan arsip digital di masa mendatang.

Keywords: Implementasi Kebijakan, Srikandi, BAPPEDA-Litbang.

PENDAHULUAN

Menyusul pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik (SPBE), transformasi digital dalam administrasi pemerintahan telah muncul sebagai kebutuhan yang sangat penting. Aplikasi SRIKANDI merupakan contoh implementasi yang meningkatkan akuntabilitas, mendorong keterbukaan birokrasi, dan mengoptimalkan efektivitas administrasi arsip.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (BAPPEDA-Litbang) Kabupaten Indramayu adalah entitas pemerintah daerah yang aplikasi SRIKANDI-nya belum sepenuhnya terealisasi potensinya. Meskipun demikian, penggunaan aplikasi tersebut masih terhambat oleh banyak tantangan, termasuk metode komunikasi dan koordinasi birokrasi, infrastruktur teknologi, dan sumber daya manusia. Studi ini penting untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penerapan aplikasi SRIKANDI di BAPPEDA-Litbang Kabupaten Indramayu, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Diharapkan temuan penelitian ini akan mendorong rencana implementasi kebijakan digitalisasi kearsipan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan observasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan komprehensif mengenai alasan-alasan yang menghambat penerapan aplikasi Sistem Informasi Arsip Dinamis Terpadu (SRIKANDI) BAPPEDA-Kabupaten Litbang Indramayu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Impelementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan elemen penting dalam siklus kebijakan publik karena menentukan sejauh mana tujuan kebijakan tercapai. Van Meter dan Van Horn (1975) mendeskripsikan implementasi sebagai upaya yang dirancang untuk memenuhi tujuan yang ditentukan dalam keputusan kebijakan.

Di sisi lain, Mazmanian dan Sabatier (1983) menekankan bahwa faktor eksternal, keadaan kelembagaan, dan variabel kebijakan semuanya berdampak pada implementasi. Oleh karena itu, para pelaku dan lingkungan yang terlibat sama pentingnya dengan isi kebijakan itu sendiri bagi keberhasilan kebijakan.

Aplikasi SRIKANDI

Untuk mencapai tata kelola arsip elektronik terintegrasi, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berkolaborasi dengan Kementerian Administrasi dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Badan Nasional Penilaian dan Penerapan Teknologi (BSSN), dan Kementerian Informatika untuk mengembangkan satu implementasi aplikasi ini. Instansi pusat dan daerah diwajibkan untuk menggunakan SRIKANDI sebagai aplikasi pengarsipan generik. Meskipun studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa SRIKANDI dapat meningkatkan efektivitas manajemen arsip, tantangan seperti infrastruktur yang tidak memadai, rendahnya literasi digital di kalangan pegawai pemerintah, dan kurangnya sosialisasi masih umum terjadi (Rahmawati, 2022; Prasetyo, 2023).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa dimensi yang menjadi dasar acuan dalam meneliti seberapa efektif nya sebuah kebijakan, penulis mencantumkan dimensi- dimensi yang dikembangkan oleh Edward III sebagai berikut;

Dimensi Komunikasi

Menurut penelitian penulis, Badan Studi dan Pengembangan Kabupaten Indramayu (Bappeda Litbang) belum menyebarluaskan sosialisasi dan pelatihan tentang aplikasi Srikandi secara merata. Pejabat struktural masih memperoleh lebih banyak informasi tentang penggunaan dan kebijakan aplikasi teknis daripada pekerja pelaksana. Akibatnya, pemahaman karyawan bervariasi, yang menyebabkan implementasi aplikasi yang tidak merata dalam pengelolaan arsip. Edward III (1980) menegaskan bahwa implementasi kebijakan yang efektif bergantung pada komunikasi yang jelas dan konsisten.

Dimensi Sumber Daya

Ketersediaan infrastruktur TI, termasuk PC dan jaringan internet yang sudah usang, terus menjadi masalah bagi penerapan Srikandi. Selain itu, kemampuan teknis para pekerja federal dalam menggunakan program ini sangat rendah, terutama di kalangan mereka yang memiliki tingkat literasi digital yang rendah. Keadaan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Prasetyo, 2023), yang menemukan bahwa hambatan utama digitalisasi arsip di daerah adalah kurangnya sumber daya manusia dan teknologi.

Dimensi Disposisi

Dari sisi disposisi, pimpinan Bappeda Litbang menunjukkan komitmen dalam mendukung implementasi aplikasi Srikandi, namun motivasi sebagian pegawai masih rendah. Beberapa pegawai cenderung enggan beradaptasi dengan sistem baru dan lebih nyaman menggunakan metode manual. Sikap ini memperlambat proses integrasi kearsipan digital. Menurut Edward III, sikap dan komitmen pelaksana sangat menentukan efektivitas implementasi, sehingga tanpa dukungan motivasi aparatur, kebijakan sulit tercapai optimal.

Dimensi Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi Srikandi masih cenderung kompleks. Prosedur pengelolaan arsip elektronik sering berlapis dan koordinasi antarbagian belum berjalan efektif. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam input maupun distribusi arsip digital. Sesuai teori Edward III, struktur birokrasi yang terlalu berbelit akan menjadi hambatan implementasi, sementara struktur yang jelas dan sederhana justru akan memperlancar pelaksanaan kebijakan.

KESIMPULAN

Hambatan terbesar dalam implementasi Srikandi di Bappeda Litbang, Kabupaten Indramayu, meliputi rendahnya motivasi karyawan, prosedur birokrasi yang tidak efektif, dan kurangnya komunikasi serta sumber daya, menurut empat dimensi Edward III. Hal ini mendukung gagasan bahwa faktor manusia, organisasi, dan infrastruktur pendukung semuanya berdampak pada implementasi kebijakan, sehingga lebih dari sekadar masalah teknologi. Peningkatan sosialisasi dan pelatihan, penguatan kemampuan sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur yang memadai, dan penyederhanaan proses birokrasi harus menjadi tujuan utama inisiatif perbaikan.

Penggunaan aplikasi Srikandi oleh pemerintah daerah merupakan langkah penting dalam memajukan tata kelola pemerintahan yang baik dalam strategi digitalisasi arsip mereka. Namun demikian, sebagaimana diuraikan oleh teori Edward III, penelitian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Litbang) di Kabupaten Indramayu mengungkapkan bahwa pelaksanaannya terus menghadapi hambatan dalam hal komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Terlepas dari keterbatasan tersebut, analisis menunjukkan bahwa implementasi Srikandi memiliki potensi yang cukup besar untuk dioptimalkan, bergantung pada dukungan kepemimpinan, ketersediaan regulasi, dan apresiasi terhadap pentingnya transformasi digital. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan perubahan strategis melalui perluasan jangkauan, renovasi infrastruktur yang memadai, dan penyederhanaan birokrasi.

Dengan menciptakan studi implementasi kebijakan publik, khususnya di bidang digitalisasi arsip, penelitian ini diharapkan dapat memajukan bidang akademik. Penelitian ini juga akan menawarkan wawasan yang berguna bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan implementasi aplikasi Srikandi di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- AMSYAH, Z. (1996). *Manajemen Kearsipan (7th Ed.)*. PT Ikhrar Mandiri Abari. Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Rineka)*.
- Aris Ariyanto, Hadion Wijoyo And Agus Sudarsono Kiki Dwi Wijayanti, *Sistem Informasi Manajemen*, Cetakan Pertama (Insan Cendekia Mandiri, 2021).
- Barthos, Basir, *Manajemen Kearsipan Untuk Lembaga Negara, Swasta, Dan Perguruan Tinggi*, Cet 3 (PT Bumi Aksara, 2000) Cetakan I (PT Grasindo, 2008) Cipta, 2010).
- Gaol, Jimmy L, *Sistem Informasi Manajemen: Pemahaman Dan Aplikasi*,
- Ibnu Syamsi, *Pengambilan Keputusan Dan Sistem Informasi* (PT Bumi Aksara, 2000)
- Indrajit, R.E (2016). *Konsep Dan Strategi Elektronik Government*. Andi
- Indrajit, Richard.E (2006). *Electronic Government : Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet Dan Teknologi Informasi*. Aptikom
- Moleong, L.J (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya
- Natsir, L. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pedagang Kaki Lima Kawasan Zona Merah Di Kota Bandung. *Aspirasi*, 8(2), 24- 31.
- Putra Alief Dityaprima, P. (2024). Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Pada Arsip Nasional Republik Indonesia (Anri) Effectiveness Of The Application Of The Integrated Dynamic Archival Information System (Srikandi) In The National Archives Of The Republic Of Indonesia (Anri) (Doctoral Dissertation, Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta).
- Septiana, A. R., Supratno, Bormasa, F. M., Alasan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., Lalamafu, P., Triono, Mosshananza, H., Kusnadi, I. H., Sunariato, Rijal, S., & Seran, D. A. N. (2023). *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi*. In *E-Book* (Researchgate.Net) (Issue Maret).
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP)
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi SRIKANDI Peraturan Bupati Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Arsip Perpustakaan dan Arsip